

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK NUGGET IKAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2020/PN Tjk)

Oleh :

Khairuna Azzahra

E1A018179

ABSTRAK

Tidak semua produk pangan olahan yang beredar di pasaran memberikan jaminan atas mutu dan keamanan kepada konsumen. Standar atas mutu dan keamanan dari produk pangan olahan ditentukan dengan izin edar. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam kasus produk *nugget* ikan yang tidak memiliki izin edar.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Metode analisis bahan hukum dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Nanang Riadi Bin Adang selaku pelaku usaha pangan olahan berupa *nugget* ikan dengan merek gumilang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf g, dan huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena telah memproduksi dan mengedarkan produk tanpa adanya izin edar. Hakim menjatuhkan putusannya berdasar pada Pasal 142 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Izin Edar

**LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMERS OF FISH NUGGET
PRODUCTS THAT DO NOT HAVE A CIRCULATION LICENSE BASED ON
LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION**

(Study of Decision Number 980/Pid.Sus/2020/PN Tjk)

By :

Khairuna Azzahra

E1A018179

ABSTRACT

Not all processed food products circulating in the market provide guarantees for quality and safety to consumers. Standards for the quality and safety of food products are determined by distribution permits. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection became legal protection for consumers in Indonesia. This study discusses the legal protection of consumers based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, in the case of fish nugget products that do not have a distribution permit.

The approach method used is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The data used is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Methods of collecting data with literature study in the form of descriptions arranged systematically. Legal material analysis method using qualitative normative analysis method.

The results of this study indicate that Nanang Riadi Bin Adang as a processed food business actor in the form of fish nuggets with the gumilang brand has carried out actions that are prohibited by business actors as regulated in Article 8 paragraph (1) letter a, letter g, and letter i of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection for producing and distributing products without a distribution permit. The judge rendered his decision based on Article 142 of Law no. 18 of 2012 concerning Food.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Distribution Permit*